

Analisis Tataniaga Kubis (*Brasica Oleracea*) Organik Bersertifikat Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Skripsi S1, Oleh: Afridha Rahman, Pembimbing: Dr.Ir. Nofialdi, M.Si dan Rina Sari, SP, M.Si

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Analisis Tataniaga Kubis (*Brasica oleracea*) Organik Bersertifikat di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso” ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2011. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem tataniaga dan efisiensi tataniaga kubis organik bersertifikat di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan kuisioner dengan petani dan pedagang sampel. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, Lembaga Sertifikasi Organik Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik dan Balai Penyuluh Pertanian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat satu saluran tataniaga kubis organik bersertifikat di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, yaitu dari petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan konsumen. Fungsi-fungsi tataniaga pada petani yaitu fungsi penjualan, resiko, modal dan informasi pasar. Fungsi-fungsi tataniaga pada pedagang pengumpul yaitu fungsi pembelian, pengangkutan, pengemasan, resiko, modal dan informasi pasar. Fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh pedagang pengecer yaitu fungsi pembelian, penjualan, pengangkutan, pengemasan dan resiko, modal dan informasi pasar.

Kegiatan tataniaga kubis organik bersertifikat belum berjalan efisien, terbukti bahwa keuntungan yang diterima masing-masing lembaga tataniaga tidak sama dengan keuntungan yang seharusnya diterima. Petani menerima keuntungan dari kegiatan tataniaga sebesar Rp.309,39/kg padahal keuntungan seharusnya yang diterima adalah Rp.779,12/kg sedangkan keuntungan pedagang pengumpul adalah Rp.256,40/kg padahal keuntungan seharusnya yang diterima adalah Rp.159,34/kg dan keuntungan pedagang pengecer adalah Rp.818,58/kg padahal keuntungan yang seharusnya diterima adalah Rp.445,77/kg.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pertanian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian bangsa, hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Pada tahun 2009 jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian di Indonesia adalah 43.029.439 orang atau sekitar 41,19 % dari 104.458.444 jiwa penduduk yang bekerja (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2009).

Sektor pertanian di Sumatera Barat merupakan sektor andalan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, dimana kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Barat pada tahun 2009 sebesar 23,67 % dan diantaranya 11,76 % adalah kontribusi dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura (Badan Pusat Statistik Sumbar, 2009). Sektor pertanian merupakan penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang punya kontribusi terhadap perekonomian daerah (Departemen Pertanian, 2010).

Salah satu upaya untuk terus meningkatkan kontribusi sektor pertanian adalah dengan pengembangan produksi tanaman hortikultura. Pengembangan hortikultura haruslah dilakukan secara profesional yaitu dengan adanya pembangunan seimbang antara aspek pertanian, bisnis, dan jasa penunjang. Pembangunan pertanian yang tidak disertai dengan sarana pendukung yang memadai serta kurang sinkronnya antara industri hulu dan hilir kurang memberikan kontribusi yang menggembirakan (Antara, 2004).

Nilai buah dan sayur-sayuran segar meningkat dua kali lipat di Indonesia selama tahun 1994-2004, sehingga menjadi industri yang bernilai cukup tinggi. Meskipun pengeluaran untuk buah dan sayur-sayuran hanya 50 persen dari pengeluaran untuk beras di Indonesia tahun 1994, pengeluaran untuk buah dan sayur-sayuran meningkat hingga 75 persen dari pengeluaran untuk beras pada tahun 2004

dan di daerah perkotaan mencapai 100 persen dimana penduduk perkotaan yang jumlahnya hampir separuh dari penduduk Indonesia melakukan pengeluaran untuk mengkonsumsi beras serta buah dan sayur (Departemen Dalam Negeri, 2007).

Keberhasilan kegiatan produksi yang telah dicapai dalam bidang pertanian tidak dapat dipisahkan dari input (masukan) bahan-bahan anorganik yang tinggi terutama bahan kimia pertanian seperti pupuk urea, SP-36, KCL, pestisida, herbisida dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Penggunaan bahan-bahan kimia pertanian secara berkelanjutan akan berdampak serius untuk kehidupan makhluk di dalam tanah yang berguna untuk menyuburkan tanah (Mutiarawati, 2001).

Program revolusi hijau yang dahulunya dicanangkan pemerintah ternyata membawa dampak serius yaitu semakin meminggirkan petani. Petani justru tergantung kepada perusahaan-perusahaan besar penghasil bahan-bahan kimia pertanian dimana bahan-bahan tersebut memberikan dampak kerusakan yang luas terhadap lingkungan. Tanah pesawahan semakin lama semakin mengeras, penggunaan pupuk kimia meningkat dari waktu ke waktu, serangan hama menjadi semakin eksploisif dan menuntut penggunaan pestisida yang semakin meningkat pula. Pestisida tidak hanya mematikan hama tetapi juga memusnahkan kehidupan yang lain. Dunia barat sebagai penggagas pertanian modern sudah lama menyadari dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan-bahan kimia sintetis dalam dunia pertanian (Suwanto, 2008).

Kemajuan teknologi dalam bidang pertanian sebagai dampak dari revolusi industri, revolusi kimia dan revolusi hijau, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara global, namun juga membawa dampak negatif. Penggunaan sarana produksi pertanian yang tak beraturan (*not renewable*) seperti pupuk buatan dan pestisida secara terus menerus pada sistem pertanian konvensional dan dengan takaran yang berlebihan menyebabkan antara lain: (1) pencemaran air tanah dan air permukaan oleh bahan kimia, (2) membahayakan kesehatan manusia dan hewan, (3) menurunkan keanekaragaman hayati, (4) meningkatkan resistensi organisme

pengganggu dan, (5) menurunkan produktifitas lahan karena erosi dan pemadatan tanah (Mutiarawati, 2001).

Permintaan masyarakat akan produk sayur-sayuran organik semakin meningkat dari waktu ke waktu, tidak hanya di negara berkembang. Konsumen kelas menengah ke atas bersedia membayar lebih mahal untuk produk organik, karena didasari alasan penting, yaitu produk aman bagi kesehatan. Seperti halnya di negara-negara maju, kebutuhan sayuran organik di Tanah Air diyakini banyak pihak juga akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu (Lembaga Sertifikasi Organik, 2010).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan sistem pertanian yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, pertanian organik menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil. Pemerintah akhirnya mempunyai komitmen untuk mengembangkan pertanian organik yang pada awal revolusi hijau tidak mendapat perhatian yang memadai. Departemen Pertanian mencanangkan Program Go Organik 2010 dengan berbagai tahapan yang dimulai tahun 2010 (Suwanto, 2008).

Budidaya sayuran organik sudah mulai berkembang dengan baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi, dengan komoditas sayur yang beragam. Budidaya organik juga didorong pengembangannya dalam rangka mengatasi kelangkaan dan mahalnya pupuk dan pestisida buatan, disamping memperbaiki kondisi fisik tanah secara lestari serta meningkatkan mikrobiologis dalam tanah dalam menunjang sumber daya alam secara berkelanjutan (*sustainable*) (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2010).

Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan komoditi hortikultura organik, maka mulailah dikembangkan beberapa tanaman hortikultura organik, dan salah satunya adalah tanaman kubis organik. Sayur kubis organik diproduksi dengan ramah lingkungan, dan tidak menggunakan input anorganik (Suwanto, 2008).

Tanaman kubis merupakan salah satu tanaman sayur komersial yang dihasilkan di Indonesia dan mendapat prioritas pengembangan dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lampiran 1). Tanaman ini mempunyai nilai ekonomis

yang sangat tinggi. Selain itu tanaman kubis merupakan salah satu tanaman sayuran yang dominan dipasarkan di Sumatera Barat dan tanaman kubis menjadi salah satu sayuran yang dapat dipasok untuk memenuhi kebutuhan sayuran daerah lain seperti Jakarta dan Batam (LSO, 2010).

Kubis organik bersertifikat adalah kubis yang ditanam pada lahan yang telah mendapat sertifikat dari LSO, dan melaksanakan kegiatan usahatani secara organik tanpa menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Kubis yang ditanam pada lahan yang telah mendapatkan sertifikasi dari LSO dan melaksanakan budidaya secara organik maka dalam kegiatan penjualannya dapat menggunakan label organik pada kemasan produknya. Dengan adanya label organik ini akan memberikan jaminan bagi konsumen dari penipuan produk pertanian (LSO, 2010).

Seperti halnya komoditas hortikultura umumnya maka kegiatan pemasaran menjadi kegiatan penting yang menjadi perhatian. Banyak petani yang terjebak oleh kondisi pasar yang sulit diprediksi, sehingga peningkatan kesejahteraan hanya impian belaka, karenanya pengembangan hortikultura haruslah secara profesional, artinya ada pembangunan yang seimbang antara aspek pertanian, bisnis, dan jasa penunjang (Antara, 2004). Penanganan produksi tanpa didukung dengan pemasaran yang baik tidak akan memberi manfaat dan keuntungan bagi petani (Suwantoro, 2008).

Sifat dari produk pertanian mengharuskan adanya penanganan yang baik dalam pemasarannya. Pemasaran produk pertanian sering kurang diperhatikan. Fungsi-fungsi pemasaran seperti pembelian, sortasi, grading, penyimpanan, pengangkutan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan, sehingga efisiensi pemasaran menjadi lemah. Salah satu kegiatan pemasaran yang langsung berhubungan dengan konsumen dan mempunyai peranan yang cukup besar dalam menciptakan faedah suatu produk adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang tepat sangat dibutuhkan untuk menempatkan suatu produk pada tempat yang tepat, kualitas yang tepat, jumlah yang tepat, harga yang tepat dan waktu yang tepat (Hakimi, 2009).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Saluran tataniaga kubis organik bersertifikat yaitu: petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen. Fungsi-fungsi tataniaga pada petani adalah fungsi penjualan, fungsi resiko, fungsi modal dan informasi pasar. Fungsi-fungsi tataniaga pada pedagang pengumpul terdiri dari fungsi pertukatan yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi fisik yang dilakukan pedagang pengumpul adalah fungsi pengangkutan dan fungsi pengemasan. Fungsi fasilitas yang dilakukan pedagang adalah fungsi resiko, modal dan fungsi informasi pasar. Fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh pedagang pengecer adalah fungsi pertukatan yaitu fungsi pembelian dan penjualan. Sedangkan untuk fungsi fisik terdiri dari fungsi pengangkutan dan fungsi pengemasan. Fungsi fasilitas terdiri dari fungsi resiko, modal dan informasi pasar. Permasalahan dalam kegiatan tataniaga kubis organik pada petani adalah belum adanya pasar yang jelas untuk pemasaran kubis organik bersertifikat sehingga tidak ada perbedaan harga antara kubis organik bersertifikat dengan kubis non organik, kondisi ini terjadi karena Penggerak Membangun Desa belum bekerja maksimal dalam kegiatan pemasaran. Permasalahan pada pedagang pengumpul yaitu adanya ancaman dari pedagang dari daerah luar yang datang membeli kubis ke Nagari Koto Tinggi dan memberikan harga yang tinggi. Permasalahan pada pedagang pengecer yaitu mereka tidak memiliki ruangan khusus untuk menyimpan kubis yang tidak habis terjual.
2. Kegiatan tataniaga kubis organik di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso dilihat dari rata-rata keuntungan yang diterima masing-masing lembaga tataniaga dikatakan tidak efisien. Hal ini terlihat dari perbedaan keuntungan yang diterima masing-masing lembaga tataniaga berbeda dengan keuntungan yang diterima seharusnya. Petani menerima keuntungan dari kegiatan tataniaga sebesar Rp.309,39/kg padahal keuntungan seharusnya yang diterima adalah Rp.779,12/kg sedangkan keuntungan pedagang pengumpul adalah Rp.256,40/kg padahal keuntungan seharusnya yang diterima adalah Rp.159,34/kg dan keuntungan

pedagang pengecer adalah Rp.818,58/kg padahal keuntungan yang seharusnya diterima adalah Rp.445,77/kg.

5.2. Saran

1. Penggerak Membangun Desa (PMD) disarankan agar bekerja lebih maksimal untuk membantu petani dalam mencari peluang pasar serta membantu penjualan hasil komoditi organiknya sehingga petani mendapatkan harga yang layak.
2. Pemerintah dalam hal ini diharapkan cepat tanggap dan memberikan solusi untuk masalah pemasaran komoditi organik petani di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, selain karena komoditi yang mereka tawarkan adalah komoditi organik dari segi manajemen dan teknis petani Gapoktan Bersaudara juga telah mendapatkan penghargaan dari bapak Presiden R.I pada tahun 2010. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi program PMD yang telah dibentuk, jika memang program PMD tidak efektif untuk dilaksanakan maka tidak ada salahnya untuk membimbing dan memberdayakan Gapoktan agar bisa mandiri dalam kegiatan pemasaran hasil komoditi organik.